

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Atmaja, I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- Azhary, H. Muhammad Tahir, 2003, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta.
- Fajar N.D., Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ghoffar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., *et.al.*, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., *et.al.*, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hariwijaya, M. dan Bisri M. Djaelani, 2008, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Husein, H.M. Wahyudin dan H. Hufron, 2008, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Latif, Abdul dan H. Hasbi, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud M.D., Moh., 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Marbun, S.F., 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., *et.al*, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2004, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mawardi, Irvan, 2016, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Ridwan H.R., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan H.R., 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Siahaan, Pataniari, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Triwulan T., Titik, dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1268).

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

PENELITIAN HUKUM

Pangestu, Prasetio Prabowo, 2016, "Sikap Diam Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Keputusan Fiktif Positif dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 04/P/FP/2016/PTUN-JKT)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto.

Wicaksono, Rendy Setiawan Budi, 2016, "Keputusan Fiktif Negatif Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 94/G/2013/PTUN-SMG)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto.

JURNAL

Kartika Widya Utama, "Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif", *Notarius*, Edisi 08 Nomor 2 September 2015.

INTERNET

Mawardi, Irvan, "KTUN "Fiktif Positif" dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah" (*online*), <http://ptun-samarinda.go.id/index.php/layanan-publik/42-ktun-fiktif-positif-dan-akuntabilitas-administrasi-pemerintah>,

diakses 20 Oktober 2016.

Tanpa nama, 2012, “Makna Sikap Diam di Mata Hukum” (*online*), <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f1ff9d322ae4/makna-sikap-diam-di-mata-hukum>, diakses 14 Mei 2017.

RISALAH SIDANG

DPR RI, Sekretariat Jenderal, 2012, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

DPR RI, Sekretariat Jenderal, 2014, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.